

**PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN: SUATU  
KONSEPSI MENGHAPUS MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KELURAHAN  
PRAWIRODIRJAN**  
*(Empowering of Migrant Workers: A Conception for Eliminating  
Social Welfare Problems in Prawirodirjan)*

Nina KARININA

**Abstract** Actually, a serious program for poverty alleviation has been started since the last five years. To alleviate poverty problem especially in urban areas should not be focused on physical infrastructure development alone. It should be considering the dimension of social development to make urban development to be more harmony. Poverty alleviation is almost considered as the ultimate goals of the city planning, and this problem caused by the process of urbanization. Contemporary social problems in urban areas such as financial assistance for the poor, adolescent problem, drug abuse, criminality, prostitution, social dysfunction, social conflict, etc. Efforts to prevent these problems are needed; and improvement the quality of life of migrant workers should be the priority for the government of the municipalities. Regarding these problems, results of the research in Kelurahan Prawirodirjan found evidences that the empowerment program directed to migrant workers resulting a good lessons learned for us.

**Key Word:** Migrant workers, Social welfare problems.

---

## 1. PENDAHULUAN

Migrasi penduduk yang masuk ke kota Yogyakarta dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga kota baik bagi penduduk setempat yang sudah lama menetap di sana maupun kaum migran. Tetapi juga telah meningkatkan beban tugas pemerintah kota terkait dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Kota Yogyakarta secara administratif meliputi 14 wilayah kecamatan dan 45 wilayah kelurahan.

Dari lima daerah tingkat dua yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta. Menurut data hasil registrasi penduduk pada tahun 1998 ternyata penduduknya berada pada peringkat ke empat dari empat daerah tingkat dua lainnya di wilayah provinsi tersebut. Kabupaten Sleman berpenduduk 824.266, Bantul 760.891, Gunungkidul 734.292, Yogyakarta 460.954, dan Kulonprogo 435.225. Ditinjau dari segi kepadatan penduduk, di kota Yogyakarta rata-rata 14.799 orang per kilometer persegi. Dengan demikian kepadatan

penduduknya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah tingkat dua lainnya, yaitu di Sleman hanya 1.434, Bantul 1.501, Kulonprogo 742, dan di Gunungkidul 496 (Anonim,1998, hal. 14-20).

Diperkirakan arus migrasi penduduk dari berbagai daerah pedesaan yang ada di wilayah D.I. Yogyakarta. Kondisi akan terus berlanjut sehingga kepadatan penduduk di kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi akan bertambah padat. Menurut data statistik tahun 1999 di D.I. Yogyakarta diketahui bahwa dari seluruh penduduk yang jumlahnya 3.264.920 orang, sebanyak 186.414 atau 57,11% tinggal di daerah pedesaan, dan 1.400.328 atau 42,89% tinggal di perkotaan. Bilamana dibandingkan dengan keadaan penduduk pada tahun 1995. Diketahui bahwa dari 3.154.265 orang diketahui bahwa penduduk DIY, sebanyak 1.804.157 orang atau 57,20% tinggal di pedesaan, sedangkan 1.350.108 Orang atau 42,80% tinggal di perkotaan (Anonim,1999,hal.89). Dengan demikian dalam waktu empat tahun penduduk perkotaan naik sebesar 0,09%.

Ada berbagai alasan dalam memutuskan untuk migrasi. Berdasarkan data hasil survei antar sensus tahun 1995 terdapat migran risen antar desa yaitu tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu. Alasan-alasan utama bagi migran risen antar desa di provinsi D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan migrasi khususnya migrasi antar desa di D. I. Yogyakarta adalah sebanyak 36,7% karena alasan keluarga, 16,5% alasan pekerjaan, 2,4% mencari pekerjaan, 37,3% pendidikan,

dan 7,1% alasan lainnya (Anonim,1995,hal.51).

Secara umum permasalahan komunitas migran di kota Yogyakarta berkaitan dengan berlanjutnya migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota tersebut dengan maksud untuk berusaha memperbaiki kesejahteraan mereka. Ada berbagai aktivitas sosial ekonomi yang telah dilakukan. Para Kepala Keluarga migran untuk mempertahankan kelangsungan hidup dirinya bersama keluarga yang menjadi tanggungannya.

Bagi pemerintah kota setempat tantangan yang dihadapi di bidang sosial, khususnya Masalah kesejahteraan penduduk yang perlu diantisipasi agar di suatu saat tidak menimbulkan dampak sosial. Penanganan masalah-masalah kesejahteraan bagi pekerja migran pada saat penelitian ini dilaksanakan belum terpolakan secara khusus. Guna mendukung pembangunan kesejahteraan sosial pekerja migran di kota Yogyakarta. Khususnya di kelurahan Prawirodirjan yang lebih baik di masa depan antara lain diperlukan suatu model pemberdayaan yang efektif. Penyusunan model pemberdayaan pekerja migran dapat dilakukan lebih efektif apabila didasarkan pada data hasil survai tentang masalah pekerja migran yang bersangkutan. Oleh karena itu yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini adalah : Bagaimana strategi mengatasi masalah kesejahteraan sosial komunitas pekerja migran di Kelurahan Prawirodirjan ?

Tujuan penulisan ini adalah menyusun suatu konsepsi penanganan masalah kesejahteraan sosial pekerja migran. Terutama di daerah kota akibat

arus migrasi penduduk. Manfaatnya sebagai masukan terhadap perencanaan sosial dalam upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kelurahan Prawirodirjan.

## **2. PERAN PERENCANAAN SOSIAL**

Perencanaan sosial dalam konteks makalah ini adalah suatu pembuatan keputusan yang berkait dengan kelompok pekerja migran. Sebagai upaya mendapatkan program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial pekerja migran di Kelurahan Prawirodirjan.

Masalah kesejahteraan sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang merupakan salah satu kegagalan atau kesulitan mereka dalam melaksanakan fungsinya. Bilamana dalam suatu tatanan masyarakat terdapat banyak penduduk atau orang-orang yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Maka hal tersebut perlu segera ada peran pemerintah bersama masyarakat untuk mencari solusi yang tepat.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pada Bab I pasal 2 ayat (1) istilah kesejahteraan sosial dirumuskan sebagai: *"suatu tata kehidupan dan penghidupan yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,*

*keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila".* Selanjutnya pada Bab III pasal 8 juga dicantumkan bahwa: *"masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan."*

Mewujudkan kesejahteraan sosial di antara para migran di daerah kota Yogyakarta yang didasari dengan makna seperti dirumuskan pada pasal-pasal yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang kondisi para migran seperti mengenai kesehatannya, pendidikan anak, sosial ekonomi dan lain-lain. Didalam memahami kesejahteraan sosial migran di kota Yogyakarta perlu diketahui berbagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Termasuk masalah yang dapat menghambat upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial migran di kota Yogyakarta.

Pada umumnya masalah migran perkotaan identik dengan masalah kemiskinan kota. Masalah tersebut berkait dengan masalah di pedesaan. Dengan demikian ruang lingkup masalah migran bukan saja menjadi masalah kota. Tetapi masalah nasional yang berkaitan dengan ketimpangan sosial ekonomi. Warga masyarakat yang hidup dengan penghasilan yang minim dapat mengalami berbagai masalah kesejahteraan. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok seperti tidak tercukupinya kebutuhan makan, perumahan yang tidak layak, pakaian tidak tercukupi dan

kondisi kesehatan buruk.

Upaya-upaya menghapus kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru. Upaya untuk maksud tersebut secara terprogram sudah dimulai sejak adanya Pembangunan Lima Tahunan yang dimulai tahun 1969. Program peningkatan kualitas hidup di daerah kumuh perkotaan antara lain ditempuh dengan cara pembangunan rumah murah dan pemugaran daerah kumuh dengan program-program relokasi yang adekuat yang dapat memecahkan masalah-masalah sosial lainnya. Seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja serta perilaku menyimpang lainnya. Dengan kata lain keadaan seperti tersebut jelaslah bukan hanya perubahan-perubahan secara fisik sebagai pembaharuan kota.

Pembangunan rumah yang bagus semata-mata tidak mampu untuk meningkatkan kehidupan penyandang fakir miskin. Oleh karena itu dalam perencanaan kota kiranya perencanaan fisik harus sejalan dengan perencanaan sosial. Misalnya dalam ruang lingkup tugas pekerjaan sosial, program-program baru yang dikembangkan dalam penanganan masalah-masalah sosial di perkotaan hendaknya dengan menerapkan berbagai penyuluhan dan bimbingan sosial. Secara nasional program-programnya disusun oleh Departemen Sosial sebagai leading sektor dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam permasalahan tersebut.

Prakteknya, menghapus kemiskinan di kota adalah salah satu tujuan akhir dalam perencanaan kota. Upaya-upaya perencanaan kota kemudian

berkembang sebagai konsekuensi terhadap kondisi-kondisi di mana kota menjadi tujuan migrasi dari daerah pedesaan dalam tujuan perbaikan hidup. Masalah-masalah sosial kontemporer di perkotaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Masalah finansial: dialami oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Penghasilan tidak cukup untuk memperoleh kepemilikan rumah, memelihara anak, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan sebagainya;
2. Masalah remaja: penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, kriminalitas, pelanggaran susila, tata tertib/ konflik antar sekolah, bolos sekolah dan lain-lain;
3. Konflik antar warga masyarakat;
4. Masalah keluarga.

Perencanaan sosial di daerah perkotaan, perencanaan secara fisik dan sosial ada kaitan satu sama lain. Perencanaan program-program yang diterapkan selayaknya dapat mendukung perkembangan suatu kota di masa mendatang. Khususnya dalam upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di daerah kota dengan segala penyertanya. Suatu program yang direncanakan secara tepat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan komunitas yang bersangkutan.

Pelaksanaan perencanaan sosial seperti tersebut di atas, perlu peran perencana yang sebaik baiknya di bidang pelayanan sosial. Perencana perlu memahami kondisi masyarakat yang sedang ditangani dengan cara mengidentifikasi secara lengkap

Yogyakarta. Jarak dari ibu kota provinsi hanya 2 km. Jarak dari pemerintahan kecamatan 1,2 km, sedangkan jarak dari ibu kota provinsi Yogyakarta 2,5 Km. Ketinggian wilayah Kelurahan ini adalah 114 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 2000-3000 mm per tahun. Suhu udara rata-rata antara 23<sup>o</sup>-30<sup>o</sup> C (Anonim,2001,hal.1).

Prasarana yang tercatat di Kelurahan Prawirodirjan menurut keadaan bulan Juni tahun 2001 dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu peruntukan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Lahan Peruntukan antara lain jalan: 3.900 Ha; bangunan umum: 7.3100 Ha., Permukiman atau perumahan : 33,7900 Ha.,lain-lain: 0,2625 Ha. Selain itu juga penggunaan lahan untuk industri:1,7300 Ha., pertokoan/ perdagangan:7,800 Ha.,perkantoran : 1,4800 Ha.Pasar desa: 0,4800 Ha., tanah wakaf: 0,900 Ha.,tanah yang belum dikelola: 32,8725 Ha (Anonim,2001,hal.2).

Ditinjau dari segi prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan ini sudah tersedia gedung-gedung mulai dari tingkat TK sampai SMTA yang jumlah masing-masing sebagai berikut (Anonim, 2001,hal.8):

- a. Gedung TK ada 5 buah, semuanya adalah milik swasta;
- b. Gedung SD berjumlah 5 buah, yang dikelola oleh swasta 4 buah dan 1 buah milik negeri;
- c. Gedung SMTP ada 2 buah, yang masing-masing 1 buah milik negeri dan 1 buah milik swasta;
- d. Gedung SMTA sebanyak 4 buah semuanya milik swasta.

Selain tempat pendidikan formal seperti tersebut di atas, ada juga tempat pendidikan non formal yaitu tempat kursus setir mobil.

Ditinjau dari segi prasarana ekonomi yang ada di daerah Kelurahan Prawirodirjan meliputi: Pasar Lingkungan 2 buah; Toko 112 buah; Warung 54 buah; Pedagang Kaki Lima 240 buah; Industri besar 2 buah; Industri sedang 8 buah; Industri Rumah Tangga 43 buah.

Prasarana Sosial yang dapat mendukung keberfungsian sosial masyarakat setempat meliputi berbagai organisasi seperti:

- a. Organisasi Sosial terdiri dari: Pramuka Gugus Depan dengan anggota sebanyak 3596 orang; Karang Taruna 40 orang anggota; PSM 19 anggota; Kelompok PKK 28 anggota; dan Dasa Wisma 500 anggota.
- b. Perkumpulan Kesenian yang terdiri dari berbagai jenis seperti - Paduan suara : 2 kelompok; - Orkes Melayu: 1 perkumpulan; - Kesenian daerah: 6 perkumpulan; -Band : 2 perkumpulan.
- e. Organisasi Keagamaan meliputi : - Majelis Ta'lim : 7 kelompok (285 anggota); - Majelis Gereja : 3 kelompok (650 anggota); - Majelis Buddha : 2 kelompok (60 anggota); - Remaja Mesjid : 7 kelompok (210 anggota); - Remaja Gereja : 3 kelompok (110 anggota); - Remaja Buddha : 1 kelompok (30 anggota).
- f. Kelembagaan Kelurahan terdiri dari - Pengurus LKMD 37 orang; - Kader Pembangunan Desa 15 orang; - Tim Penggerak PKK 23 orang; - Kader PKK 36 orang.

Keadaan Penduduk di Kelurahan Prawirodirjan dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Jumlah dan Penggolongan Penduduk Berdasarkan Usia berdasarkan data yang dihimpun pada

monografi Kelurahan Prawirodirjan, penduduk berusia dewasa di Kelurahan ini jumlahnya lebih besar dibandingkan usia muda. Penggolongan usia tersebut secara lebih terperinci di Kelurahan Prawirodirjan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Penduduk Kelurahan Prawirodirjan Berdasarkan Usia Tahun 2001**

No	Usia	Jumlah	%
1	0 - 3 tahun	876	7,31
2	4 - 6 tahun	817	6,81
3	7 - 12 tahun	1057	8,82
4	13 - 15 tahun	538	4,49
5	16 - 18 tahun	867	7,23
6	> 19 tahun	7834	66,34
Jumlah		11.986	100,00

Sumber: Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, hal 3

**Tabel 2 Penduduk Prawirodirjan Berdasarkan Usia Tenaga Kerja Pada Tahun 2001**

No	Usia	Jumlah	%
1	10 -14 tahun	876	8,95
2	15 - 19 tahun	1.458	14,90
3	20 - 26 tahun	2.155	22,02
4	27 - 40 tahun	2.369	24,21
5	41 - 56 tahun	1.684	17,21
6	> 57 tahun	1.243	12,70
Jumlah		9785	100,00

Sumber: Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, hal 3

Pengelompokan penduduk berdasarkan usia tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2, berikut:

Sesuai dengan karakteristik penduduk perkotaan yang sifatnya heterogin, penduduk Kelurahan Prawirodirjan berdasarkan kewarganegaraan di sana tercatat ada 45 orang (0,375%) dari seluruh penduduk adalah warga keturunan asing.

Berdasarkan agama, dari seluruh penduduk yang ada di kelurahan ini dapat digolongkan paling banyak adalah

beragama Islam , yaitu sebanyak 9056 orang (78,01%). Kristen Protestan 1169 orang (10,01%), Katholik 1250 orang (10,27%), Hindu 29 orang (0,25%) dan Buddha 104 orang (0,90%).

Ditinjau dari segi kondisi pendidikan, yang paling banyak adalah yang berpendidikan SD yang meliputi 29% . Secara terperinci tingkat pendidikan yang dicapai seperti tercantum pada tabel 3. (Anonim,2001,hal.4).

Tabel 3 Penduduk Prawirodirjan Berdasarkan Pendidikan Pada Tahun 2001

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	TK	517	14
2	SD	1.057	29
3	SMP/SLTP	538	15
4	SMA/SLTA	867	24
5	Akademi (D1 -D3)	321	9
6	Sarjana (S1-S2)	314	9
	Jumlah	3614	100,00

Sumber: Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, hal 4.

Ditinjau dari segi pekerjaan, penduduk Kelurahan Prawirodirjan hanya 2810 Orang yang tercatat mempunyai pekerjaan yang meliputi: Pegawai Negeri Sipil sebanyak 354 orang (12,60%), TNI 3 orang (0,1 %), karyawan swasta 1.154 orang (41,07%), wiraswasta 655 orang (23,31%), pertukangan 182 orang (6,48%), jasa 61 orang (2,17 %), pensiunan 410 orang (14,27 %) (Anonim, 2001, hal.4).

Berdasarkan data mutasi penduduk, bulan Juni tahun 2001, jumlah kelahiran di Kelurahan Prawirodirjan berjumlah 73 orang. Untuk mengetahui angka kelahiran secara kasar di Kelurahan ini dengan menggunakan rumus: (Barclay, G,W, 1983,hal 56).

$$\frac{B}{P} \cdot K,$$

B = jumlah seluruh kelahiran yang tercatat selama tahun kalender (tanggal 1 Januari sampai 31 Desember);

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun;

K= 1.000

dengan demikian angka kelahiran di Kelurahan ini dalam tahun 2001 adalah:

$$\frac{73}{11.608} \times 1000 = 6,20$$

Sedangkan jumlah warga yang meninggal dunia sampai dengan bulan Juni tahun 2001 berjumlah 31 orang. Dengan demikian angka kematian adalah  $\frac{31}{11.608} \times 1000 = 2,60$

11.608

dengan menggunakan Rumus :

$$\frac{D}{P} \cdot K,$$

di mana :

D = jumlah seluruh kematian yang tercatat selama tahun kalender (tanggal 1 Januari sampai 31 Desember);

P = jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun ( tanggal 1 Juli).

K = 1.000.

Ditinjau dari segi migrasi penduduk, diketahui bahwa migrasi masuk di Kelurahan Prawirodirjan pada tahun 2000 berjumlah 252 orang. Sedangkan migrasi ke luar adalah 174 orang (Anonim, 2000a, hal. 27). Dibandingkan dengan migrasi ke luar ternyata di Kelurahan Prawirodirjan jumlah migrasi masuk lebih tinggi. Mengantisipasi perkembangan

penduduk kota Yogyakarta dan khususnya di Kelurahan Prawirodirjan di masa mendatang perlu dipersiapkan perencanaan sosial yang memadai sejak dini untuk mengatasi kemungkinan timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial di kemudian hari.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kelurahan Prawirodirjan ditunjukkan dengan adanya kelompok penduduk yang digolongkan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial DIY, dari 11.608 orang penduduk Kelurahan Prawirodirjan di sana terdapat enam jenis PMKS. Enam jenis PMKS tersebut adalah: Penyandang Cacat, Anak Jalanan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Pengemis dan Pemulung.

Dibanding dengan jumlah penduduk Kelurahan Prawirodirjan dengan demikian ada 65 orang penyandang cacat atau 0,52% dari seluruh penduduk. Kecatatannya sebagai berikut: cacat tubuh 33 orang (50,77%) dari seluruh penyandang cacat. Lainnya adalah cacat netra delapan orang (12,31%), tuna rungu delapan orang (12,31%), psikotik empat orang (6,15%), retardasi delapan orang (12,31%), cacat ganda empat orang (6,15%). Ditinjau dari segi pendidikan, penyandang cacat tersebut paling banyak berpendidikan tingkat SLTP. Tingkat pendidikan mereka adalah sebagai berikut: tidak sekolah 7 orang (10,77%), tidak tamat SD 15 orang (23,08%), SD 3 orang (4,61%), tidak tamat SLTP 13 orang (20,10%), SLTP 19 orang (29,23%), Tidak tamat SLTA dua orang (1,54%), tidak diketahui lima orang (7,69%) (Anonim,2000,hal 47).

Anak jalanan yang terdeteksi di Kelurahan Prawirodirjan hanya berjumlah delapan orang. Anak jalanan tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. Kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari adalah mengamen. Usia mereka adalah 6 - 21 tahun ada empat orang, 13 - 15 tahun ada satu orang, 16-18 tahun ada dua orang, dan 19-21 orang ada satu orang (Anonim, 2000,hal.51).

Jumlah lanjut usia terlantar di Kelurahan Prawirodirjan berdasarkan data Dinas Sosial tahun 1999, berjumlah 19 orang. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 10 orang dan jenis kelamin perempuan sembilan orang. Dilihat dari segi pendidikan, sebanyak 11 orang (57,89%) tidak pernah sekolah, dan delapan orang (42,11%) hanya berpendidikan SD. Kegiatan mereka sebagian besar (78,95%) menganggur, dan empat orang (21,05%) bekerja. Para lanjut usia terlantar tersebut yang tinggal bersama anak-anaknya delapan orang (42,11%), dan mandiri 57,89%.

Jumlah anak terlantar seluruhnya 14 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan dua orang perempuan. Mereka berusia antara 13-15 tahun tiga orang, usia 16-18 tahun dua orang, dan 19-21 ada sembilan orang. Tingkat pendidikan yang dicapai tidak tamat SD dua orang, tamat SD tiga orang, tidak tamat SLTP satu orang, SLTP tujuh orang, dan tidak tamat SLTA satu orang. Status mereka adalah: yatim dua orang, piatu dua orang, tua masih lengkap sembilan orang. Kegiatan sehari-hari lontang lantung enam orang, membantu orang tua dua orang, lainnya enam orang (Anonim,2000 a, hal.39).



Jumlah pengemis satu orang berjenis kelamin perempuan, pendidikan SD dan mempunyai keluarga (Anonim, 2000 a,hal.41).

Jumlah pemulung hanya ada satu orang, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal menumpang (Anonim,2000a, hal.43).

Untuk mengetahui secara keseluruhan proporsi penyandang PMKS di Kelurahan Prawirodirjan tersebut dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 4 PMKS Di Kelurahan Prawirodirjan Tahun 1999**

No	Jenis PMKS	Jumlah	%
1	Anak terlantar	14	12,96
2	Pengemis	1	0,93
3	Pemulung	1	0,93
4	Penyandang cacat	65	60,18
5	Lansia terlantar	19	17,59
6	Anak jalanan	8	7,41
	Jumlah	108	100,00

Sumber: Data dan Profil 5 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Provinsi DIY Tahun2000, hal 7.

Berdasarkan data tentang penyandang PMKS di Kelurahan Prawirodirjan seperti tersebut di atas dapat diketahui sebagian besar adalah penyandang cacat. Sedangkan sebagian kecil termasuk kategori keterlantaran sosial ekonomi.

#### **4. MASALAH KESEJAHTERAAN KOMUNITAS MIGRAN DI KELURAHAN PRAWIRODIRJAN**

Hasil penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial migran yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial pada tahun 2001. Secara garis besar dapat dikemukakan beberapa hal seperti berikut (lihat Nina Karinina,2003,hlm 53-77):

Ditinjau dari segi karakteristik migran, migran masuk ke kota

Yogyakarta berdasarkan data sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 ada kenaikan sebesar 0,09 %. Sebagian besar migran atau 76,68% yang bermukim di Kelurahan Prawirodirjan berasal dari kota-kota yang berada di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya sebagian kecil yang berasal dari provinsi lain yaitu Jawa Timur dan Sumatera Barat. Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar atau 76,67% migran hanya berpendidikan SD dan paling tinggi berpendidikan SLTA sebesar 6,67%. Lainnya berpendidikan SLTP sebanyak 13,33% dan tidak pernah sekolah 3,33%. Ditinjau dari segi pekerjaan, sebagian besar atau 73,24% bekerja sebagai pedagang makanan keliling. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai buruh baik di bidang jasa maupun pengrajin perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya.

Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar migran adalah masalah sulitnya mencari nafkah. Untuk usaha dagang mereka tidak memiliki modal. Mereka juga tidak mempunyai keterampilan yang memadai dan banyak saingan. Dengan demikian masalah migran yang utama dapat dikaitkan dengan masalah kemiskinan.

Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh kaum migran di bidang pendidikan anak. Dikemukakan oleh sebagian kecil migran yaitu bahwa: pendidikan anak yang tidak dapat berlanjut karena biaya pendidikan tidak terjangkau di samping ada pula yang anaknya kurang mampu mengikuti pelajaran. Alasan lain karena anak membantu orang tua mencari nafkah.

Mengenai kesehatan yang dirasakan oleh anggota keluarga pada umumnya berada dalam kondisi yang cukup baik. Adapun mereka yang menderita penyakit, sebagian besar dari mereka tidak mengalami kesulitan dalam berobat. Sedangkan mereka yang mengalami kesulitan karena merasa biaya berobat mahal.

Ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan sandang pangan. Pada umumnya mereka sudah merasa tercukupi. Mengenai perumahan, rumah yang mereka tempati sebagian besar berstatus rumah kontrakan. Sedangkan hanya sebagian kecil saja yang berstatus rumah milik pribadi, menyewa. Ada juga yang menumpang di rumah teman. Masalah yang mereka rasakan sehubungan dengan rumah tinggal adalah bahwa rumah yang dihuni bukan rumah milik sendiri.

Pelayanan Sosial yang diberikan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah kepada mereka antara lain berupa bantuan modal usaha melalui program "Jaring Pengaman Sosial", bantuan biaya sekolah dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

Aspirasi migran dalam pelayanan sosial pada umumnya berkaitan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan. Terutama mengatasi masalah kesulitan ekonomi untuk mendapatkan biaya sekolah anak dan masalah perumahan. Mereka mengharapkan bantuan modal usaha. Sedangkan para tokoh masyarakat menganggap bahwa sebaiknya peningkatan kesejahteraan sosial keluarga migran dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Sasaran antara lain dengan bimbingan kegotongroyongan dan kerukunan antar warga masyarakat, serta penegakan norma sosial dengan penyuluhan berbagai hukum dan peraturan.

Beberapa faktor penghambat dalam pelayanan sosial bagi lembaga pemerintah terkait dalam upaya pelayanan sosial bagi penduduk setempat. Diketahui antara lain belum ada tenaga profesional, belum ada metode pelayanan yang efektif, dan keterbatasan dana. Faktor Pendukung dalam upaya pelayanan sosial adalah adanya prasarana sosial yang cukup banyak seperti organisasi sosial.

## 5. MODEL PENANGANAN PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MIGRAN

Berdasarkan kondisi-kondisi seperti yang telah dikemukakan di atas. Upaya mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi diperlukan berbagai penanganan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Penanganan masalah sosial migran dengan cara pemberdayaan keluarga, khususnya di bidang sosial ekonomi. Upaya ini ditempuh karena secara sosiologis, keluarga inti merupakan kelompok masyarakat terkecil di mana seseorang dibesarkan. Di dalam keluarga untuk pertama kalinya seseorang belajar norma. Perkembangan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyesuaikan diri dengan norma masyarakat di mana mereka berada. Selain pemberdayaan ekonomi keluarga juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan timbulnya masalah sosial lain yang suatu saat dapat menimpa mereka antara lain berbagai bentuk kenakalan remaja.
- b. Ditinjau dari segi perencanaan, dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga kota Yogyakarta. Perencanaan secara fisik dan sosial harus ada kaitan satu sama lain. Oleh karena itu dalam merencanakan program-program yang akan diterapkan agar dapat mendukung perkembangan kota Yogyakarta di masa mendatang. Khususnya dalam upaya penanggulangan masalah sosial dengan segala penyebabnya, sehingga suatu program yang direncanakan secara tepat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan komunitas setempat.
- c. Di dalam praktek, salah satu tujuan dalam perencanaan kota adalah menghapus kemiskinan kota. Agar perencanaan sosial kota dikembangkan ke arah upaya-upaya perencanaan yang merupakan konsekuensi terhadap kondisi-kondisi kota Yogyakarta yang menjadi tujuan migran dari daerah pedesaan dengan tujuan perbaikan hidup.
- d. Dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah kumuh. Antara lain dapat ditempuh dengan cara pembangunan rumah murah yang terjangkau oleh komunitas golongan ekonomi lemah. Demikian juga agar relokasi pada berbagai komunitas di daerah kumuh agar dapat memecahkan masalah-masalah sosial dan program-programnya disusun dan dianggarkan secara nasional.
- e. Sehubungan dengan hal-hal seperti tersebut di atas, kiranya suatu konsep penanganan yang dianggap layak diterapkan sesuai dengan kondisi permasalahan. Melalui peningkatan swadaya keluarga di bidang ekonomi dan bimbingan organisasi masyarakat (*community organization*). Dimaksud dengan *community organization* atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan bimbingan organisasi masyarakat ialah "salah satu metode pekerjaan sosial yang pelaksanaannya membimbing suatu masyarakat agar dapat mengatasi

kebutuhannya sendiri dengan berswasembada, yaitu dengan menggali atau mengerahkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri" (Sumhudi, M, Isom, 1972, hal.538). Arthur Dunhan, 1965, hal.33 di dalam bukunya berjudul *Community Welfare Organization, Principle and Practice* mendefinisikan *community organization* sebagai "suatu proses untuk membawa dan mempertahankan penyesuaian antara kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial di suatu wilayah geografis atau suatu bidang pelayanan tertentu" Melalui bantuan yang diberikan seperti tersebut masyarakat dapat membantu dirinya sendiri.

Suatu konsepsi penanganan yang menggunakan pendekatan pekerjaan sosial didasarkan temuan penelitian dapat diformulasikan sebagai berikut:

#### Dasar Pemikiran

Adanya ketimpangan dalam perbedaan pendapatan yang dialami penduduk perdesaan merupakan faktor utama pendorong arus migrasi penduduk dari desa ke kota. Di kota relatif tersedia lapangan kerja atau dapat diciptakan berbagai bentuk pekerjaan sektor informal. Secara ekonomi lebih memungkinkan untuk dapat mencari nafkah dalam upaya mempertahankan hidup mereka.

Laju migrasi ke kota pada kenyataannya terus meningkat dan tidak mungkin dihalangi atau dicegah. Migrasi ke daerah kota tersebut menambah komunitas miskin di daerah

perkotaan. Akibatnya menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat menambah beban tugas dan biaya yang harus dialokasikan pemerintah.

Di sisi lain komunitas migran juga memiliki potensi dibina dan diarahkan untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui program kesejahteraan sosial.

#### Keadaan Dan Masalah

Masalah sosial yang dialami komunitas migran di kota Yogyakarta sebagian besar adalah masalah sosial ekonomi yang disebabkan sulitnya mencari nafkah. Masalah migran di perkotaan keberadaannya dapat dikaitkan dengan masalah kemiskinan kota. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, mereka bekerja di sektor informal yaitu sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Usaha sektor informal adalah kegiatan orang perorang atau keluarga atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak berbadan hukum (UURI. No. 25 Tahun 1997, pasal 31 tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan atau imbalan.

Data di Kelurahan Prawirodirjan diketahui sektor ini jumlahnya paling banyak di bandingkan dengan bidang usaha lainnya. Ditinjau dari segi perkembangan kota-kota di Indonesia menunjukkan pada umumnya lama kelamaan PKL mengakibatkan kumuhnya daerah perkotaan bilamana tidak ditata penempatannya.

Upaya mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan di Indonesia bukan hal yang baru. Tetapi sudah lama dilaksanakan beberapa dasa warsa yang lalu seperti melalui P2LDT pada tahun 1980-an di daerah pedesaan dan Pemugaran Daerah Kumuh tahun 1990-an di daerah perkotaan, Kelompok Usaha Bersama, JPS dan sebagainya.

Berbagai perencanaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah serta beberapa Organisasi Sosial/LSM sebagai mitra pemerintah. Penanganan masalah sosial tidak hanya ditujukan untuk perbaikan fisik pemukiman kumuh baik di perkotaan maupun di desa. Tetapi juga meliputi peningkatan sumber daya manusianya yang dilakukan melalui berbagai pendidikan atau penyuluhan.

Masalah kemiskinan di daerah perkotaan yang berkaitan dengan peningkatan migrasi penduduk daerah tersebut. Pada umumnya tergolong kondisi sosial ekonomi dan keterampilan yang marginal dapat menimbulkan masalah sosial lain. Seperti meningkatnya kriminalitas, pemukiman kumuh, masalah anak jalanan, penyimpangan perilaku sosial, pelanggaran hukum dan lain-lain. Kemiskinan di daerah perkotaan sejak abad 20-an mengakibatkan patologi sosial dan disorganisasi sosial.

### **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya penanganan migran di daerah perkotaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup migran kelas bawah dalam rangka mencegah kerawanan sosial di daerah perkotaan.

### **Landasan Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, sebagaimana tercantum pada pasal 1 bahwa : " setiap warganegara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial".

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) bahwa yang dimaksud kesejahteraan sosial ialah " suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila".

### **Sasaran Penanganan**

Sasaran penanganan adalah komunitas migran perkotaan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Menetap di daerah kumuh; 2) Berpenghasilan rendah; 3) Memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

### **Program Dan Kegiatan**

#### **a. Program**

Ada dua program yang diperlukan yaitu bersifat pemberdayaan sosial ekonomi keluarga dan program Pencegahan Timbulnya Masalah Sosial

Program yang diterapkan adalah peningkatan swadaya ekonomi baik perorangan, keluarga batih/ unit rumah tangga maupun kelompok melalui bantuan modal usaha dan bimbingan usaha. Ruang lingkup adalah bantuan modal usaha dan pendampingan usaha. Program ini bertujuan : mengembangkan kegiatan usaha yang lebih maju dengan menggunakan teknik yang lebih baik dari segi produksi maupun pengelolaannya; mengembangkan jiwa kewirausahaan; meningkatkan keterampilan untuk melakukan usaha ekonomi. Sedangkan program pencegahan timbulnya masalah sosial adalah lebih ditekankan pada penyuluhan sosial.

b. Kegiatan

Dalam implementasi program ini terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi:

- 1) Pendataan calon keluarga binaan yang akan ditingkatkan swadainya di bidang ekonomi untuk mengetahui potensi dan kondisi ekonominya;
- 2) Identifikasi, konsultasi, motivasi dan seleksi calon warga binaan oleh pekerja sosial bersama tokoh masyarakat setempat;
- 3) Penyuluhan dan bimbingan Sosial serta Pemberian bantuan modal usaha bagi masing-masing warga binaan;
- 4) Supervisi;
- 5) Evaluasi.

### Tolok Ukur Keberhasilan

Ada tiga butir tolok ukur keberhasilan yang akan diukur yaitu: a) Setiap keluarga binaan dapat meningkatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, b) Terwujudnya kerukunan antar keluarga, c) Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat dan harmonis.

### Strategi

Strategi penanganan yang digunakan dalam konsep ini adalah: a) Menumbuhkan dan mengembangkan perilaku ekonomi produktif; b) Pengembangan kegiatan ekonomi keluarga; dan c) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat di dalam penanganan masalah sosial di lingkungannya.

### Metode Penanganan

Penanganan masalah social migran di Kelurahan Prawirodirjan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Arahnya antar aksi sosial, baik antar manusia maupun dengan sistem-sistem serta masalah-masalah yang dihadapi dalam memfungsikan individu maupun sistem sosial. Metode yang cocok untuk diterapkan adalah Bimbingan Organisasi Masyarakat (*Community Organization*).

a. Definisi

Definisi Bimbingan Organisasi Masyarakat adalah : " usaha untuk membimbing masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat agar dapat mengatasi kesukaran-kesukarannya dengan mempergunakan sumber-sumber yang ada di sekitarnya dengan cara bekerja sama yang sebaik-

*baiknya antar anggota-anggotanya"* (Sumhudi, M. Isom, 1972, hal. 534).

Membimbing masyarakat migran di Kelurahan tersebut agar dapat mengatasi kebutuhannya dengan cara menggali atau mengerahkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya yang dilakukan segenap masyarakat itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan sumber-sumber ini adalah berbagai sumber yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dalam masyarakat seperti gotong royong, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya.

b. Prinsip-Prinsip

Beberapa prinsip dalam melaksanakan metode Bimbingan Organisasi Masyarakat adalah sebagai berikut (Sumhudi, M. Isom, 1972, hal. 536 ):

Umum:

- 1) *Ada keyakinan bahwa tiap manusia mempunyai kehormatan diri, martabat serta rasa kemuliaan, dan ini semua harus dihargai sebagai miliknya;*
- 2) *Setiap manusia yang mengalami penderitaan pribadi, kesukaran ekonomi atau sosial, mempunyai hak penuh untuk menentukan sendiri apa kebutuhannya dan bagaimana cara mengatasinya;*
- 3) *Setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama, tetapi dibatasi oleh batas-batas kemampuan masing-masing;*
- 4) *Hal-hal seperti tersebut pada butir 1 sampai 3 di atas pada dasarnya betalian dengan tanggung jawab*

*sosialnya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap masyarakat.*

Khusus:

- 1) *Usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan metode community development harus didasarkan atas kebutuhan dan untuk mengatasi kebutuhan tersebut;*
- 2) *Semaksimal mungkin hendaknya fihak-fihak yang terlibat dalam usaha ini ikut serta mengolah dan mengarahkan atau memimpin pekerjaan atau setidaknya tidaknya dapat melaksanakannya;*
- 3) *Harus dibina adanya kerjasama dengan fihak-fihak swasta atau sukarelawan-sukarelawan karena inilah yang menjadi kunci berhasil atau tidaknya community organization;*
- 4) *Hendaknya usaha-usaha yang dilaksanakan mengutamakan usaha-usaha yang bersifat pencegahan.*

Penerapan Konsep

Program pemberdayaan komunitas migran dalam penerapannya dilaksanakan melalui suatu proses bimbingan sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pendekatan Awal

Merupakan langkah pertama yang ditempuh dengan cara pendekatan dan konsultasi kepada pemerintah setempat, instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan atas program yang akan dilaksanakan. Di samping itu konsultasi kepada yang ber-

sangkutan tentang keadaan dan perkembangan kondisi masalah sosial migran di daerah setempat. Kemudian untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan mereka diadakan identifikasi dan motivasi calon keluarga binaan yang akan diajak serta dalam program pemberdayaan sosial. Hal ini dilakukan agar calon keluarga binaan dapat mengenali, menghayati dan mengikuti program yang akan diterapkan.

b. Pengumpulan Data, Pengorganisasian, Penilaian dan Perencanaan.

Untuk menetapkan seseorang menjadi keluarga binaan dilakukan melalui proses pendataan, seleksi dan registrasi. Kegiatannya pemilahan nama-nama calon binaan yang dicatat secara formal dalam suatu buku registrasi sebagai keluarga yang akan mendapatkan bimbingan sosial.

c. Penelaahan dan Penganalisaan Masalah

Kegiatan ini dilaksanakan suatu penilaian untuk memahami permasalahan dan mengetahui kebutuhan calon keluarga binaan. Kemudian menindak lanjuti menghubungkan mereka dengan sumber-sumber daya yang akan memberikan pelayanan sosial.

d. Penyusunan Rencana Kegiatan

Menyusun suatu rencana disesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang ada. Atau kemampuan yang dapat dilaksanakan di lapangan.

e. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial merupakan tugas

dan tanggung jawab pekerja sosial bersama ahli lainnya. Khususnya dalam membina kerjasama antar keluarga binaan, antara keluarga binaan dengan pekerja sosial, keluarga binaan dengan masyarakat sekitar, dengan tokoh masyarakat dan lainnya yang terkait dengan program ini. Bimbingan sosial tersebut berkaitan dengan pemberian bantuan modal usaha termasuk penyelenggaraan bimbingan usaha dilakukan bekerjasama dengan pengusaha di daerah setempat.

f. Monitoring

Monitoring bertujuan untuk mengetahui proses perkembangan setiap penyelenggaraan kegiatan mulai dari pendekatan awal sampai dengan pelaksanaan keterampilan usaha bagi para keluarga binaan. Apakah telah sesuai dan mendukung tujuan program ini, sehingga dapat dilakukan perbaikan sedini mungkin. Monitoring dilaksanakan oleh staf dari Dinas Sosial / Dinas lainnya yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas ini.

g. Evaluasi

Evaluasi yang dimaksud adalah penilaian terhadap tahap-tahap kegiatan yang telah dilaksanakan. Caranya memberi penilaian didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui dengan jelas sejauh mana tujuan telah dicapai. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi, faktor apa saja yang mampu mendorong lajunya pelaksanaan program pemberdayaan keluarga migran.



## Pelaksana

Pelaksana kegiatan meliputi berbagai pihak yang peduli terhadap upaya pemberdayaan migran. Termasuk para Pekerja Sosial/ relawan sosial, tokoh masyarakat dan Pengusaha sebagai peorangan, atau mereka yang tergabung dalam suatu organisasi sosial /LSM.

## Mekanisme Kerja

Di tingkat lapangan seluruh pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial dapat dilaksanakan oleh relawan sosial yang sudah terlatih. Mereka dikoordinasikan oleh ketua Organisasi/Yayasan Sosial/ LSM sebagai penanggung jawab bimbingan organisasi masyarakat tersebut. Penerapan otonomi di daerah tingkat dua, seyogyanya pelaksanaan bimbingan organisasi masyarakat tersebut diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten / Kota atau dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

## 6. SIMPULAN

Penyusunan model pemberdayaan pekerja migran yang efektif. Perencana sosial mempunyai andil dalam perubahan pola hubungan-hubungan sosial yang diwujudkan melalui tujuan perencanaan tersebut. Peningkatan kualitas hidup pekerja migran yang diterapkan di Kelurahan Prawirodirjan ini adalah dalam rangka mencegah timbulnya masalah-masalah kesejahteraan sosial di daerah setempat. Berbagai penyuluhan sosial dan bantuan modal berusaha bagi masing-masing pekerja migran sasaran program

yang memerlukannya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Bimbingan Organisasi Masyarakat (*Community Organization*).

## PUSTAKA ACUAN

- Anonim, (1995). *Profil Kependudukan Indonesia, Supas 1995*. Jakarta; Biro Pusat Statistik.
- , (1999). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 1999*. Yogyakarta Biro Pusat Statistik D.I. Yogyakarta
- , (2000a). *Data dan Profil Lima Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999*, Yogyakarta Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- , (2000b). *Data dan Profil Keluarga Miskin Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999*.
- , (2000c). *Kecamatan Gondomanan Dalam Angka Tahun 2000*, Yogyakarta Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- , (2001a). *Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan Kotamadya Yogyakarta*.
- , (2001b). "Nasib Baik Belum Tentu Berpihak Pada Buruh, Surat Kabar Harian", *Kompas*, 19 November 2001.
- , (2001c). *Statistik Kesejahteraan Sosial 2001*, Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Dunham, Arthur, (1965): *Community Welfare Organization, Principles and Practice*, New York Thomas Y Crowell Company.
- Koentjaraningrat, (1974). *Pengantar Antropologi*, (cetakan kelima), Jakarta; Aksara Baru.

- Nina Karinina, (2003). "Masalah Kesejahteraan Sosial Migran: Studi Kasus Di Kelurahan Prawirodirjan", dalam *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*; Vol. 7 no. 2 hal. 5
- Nugroho, T, Sumarno, (1987). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (cetakan kedua) Yogyakarta; Hanindita Offset.
- Sumhudi, M. Isom, 1972: *Community Organization*, Jakarta; Sosialia.

---

**Nina Karinina.** Ajun Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial pada Puslit PKS, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI.